

ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KOTA DALAM PENANGANAN KEBERSIHAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muh. Rizqi Ramadhan

NPP. 31.0837

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: rizqi3214@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sampara Lukman, MA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problems, namely the increasing volume of waste and the community still lacking education regarding disposing of waste which results in drainage flows being blocked by rubbish, the lack of facilities and infrastructure in handling cleanliness, waste banks that are not optimal
Purpose: the aim of writing this thesis is to find out to what extent The Makassar City Government can carry out optimal hygiene management, inhibiting factors in handling hygiene, and what efforts are made by the city government to overcome inhibiting factors. **Methods:** Writing this thesis uses a qualitative method, a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The analysis techniques used are data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification. **Results/Findings:** The results of the research concluded that the handling of cleanliness carried out or attempted by the Makassar City Government is still quite good. However, it is not yet fully optimal because there are several inhibiting factors such as a lack of public understanding regarding waste transportation, public awareness, limited facilities and infrastructure, conventional levy collection, challenging landfill conditions. To overcome the inhibiting factors, the Makassar City Government is trying to carry out continuous outreach, fulfill facilities and infrastructure, increase human resources, carry out routine levies, and minimize the negative impact of the Antang TPA open dumping system. **Conclusion:** Cleanliness management has gone quite well but still requires improvement and development. In writing this thesis, the author also provided suggestions to the environmental department and city government regarding problems and obstacles in the process of handling cleanliness in Makassar City.

Keywords : Method, Sanitation Management, Makassar City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan yaitu peningkatan volume sampah dan masyarakat masih kurang edukasi terkait membuang sampah yang mengakibatkan aliran drainase tersumbat oleh sampah, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan kebersihan, bank sampah yang tidak begitu maksimal. **Tujuan:** tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Makassar dapat menyelenggarakan penanganan kebersihan secara optimal, faktor penghambat dari penanganan kebersihan, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengatasi faktor penghambat. **Metode:** Penulisan skripsi ini menggunakan jenis metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanganan kebersihan yang dilakukan atau diupayakan oleh Pemerintah Kota Makassar masih tergolong cukup baik. Namun, belum sepenuhnya optimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait pengangkutan sampah, kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, pemungutan retribusi yang masih bersifat konvensional, keadaan TPA antang. Untuk mengatasi faktor penghambat Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan, pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan pada sumber daya manusia, melaksanakan retribusi secara rutin, dan meminimalisir dampak negatif sistem *open dumping* TPA antang. **Kesimpulan:** Penanganan kebersihan telah berjalan cukup baik namun masih memerlukan peningkatan dan pengembangan. Dalam penulisan skripsi penulis juga memberikan saran kepada dinas lingkungan hidup serta pemerintah kota terkait permasalahan dan hambatan pada proses penanganan kebersihan di Kota Makassar.

Kata Kunci : Metode, Penanganan Kebersihan, Kota Makassar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebersihan lingkungan hingga saat ini masih menjadi sorotan publik dan masih banyak dibicarakan oleh masyarakat dikarenakan hal ini menyangkut dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Masalah kebersihan lingkungan merupakan persoalan jangka panjang yang dalam penanganannya diperlukan usaha berkelanjutan dari tiap-tiap unsur negara baik pemerintah maupun masyarakat. Lingkungan bersih dan sehat menjadi tuntutan dan keinginan dari seluruh lapisan masyarakat karena lingkungan sendiri merupakan tempat makhluk hidup berinteraksi dan menjalani kehidupan. Dalam penanganan kebersihan di Kota Makassar diselenggarakan melalui Dinas Lingkungan Hidup yang berkoordinasi dengan camat

dan lurah. Namun dalam output kerja yang dilakukan pemerintah Kota Makassar belum begitu terlihat ditambah dengan hilangnya gelar penghargaan Adipura dari wilayah Kota Makassar. Belum Maksimalnya pemanfaatan dari bank sampah yang berjumlah 1.014 namun yang aktif beroperasi hanya 352 bank sampah (data bersumber dari dinas lingkungan hidup kota makassar) sehingga dalam pemilahan sampah akhir dari masyarakat tidak maksimal dan mengakibatkan berakhirnya sampah dengan begitu saja pada TPA antang yang menimbulkan timbunan, di sisi lain bahwa pembuangan akhir sampah masih menggunakan sistem open dumping yang makin memperparah keadaan. Program *Pakkandatto* atau pasukan penindakan anti kotor juga masih belum terlihat hasilnya dimana bahwa sampah masih berserakan di berbagai tempat dan juga armada pengangkut sampah yang secara kualitas dan kuantitas belum memenuhi. Berbagai permasalahan tersebut harus segera dilakukan evaluasi oleh pemerintah Kota Makassar agar tercipta lingkungan yang berkualitas bagi masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam penanganan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan mengalami beberapa kendala dalam prosesnya. Jumlah volume sampah yang diproduksi oleh penduduk Kota Makassar tidak mampu seluruhnya ditangani oleh bank sampah. Bank sampah yang menjadi senjata dalam menguraikan jenis sampah dirasa belum begitu optimal kinerjanya dengan melihat total 1.014 jumlah bank sampah yang tersebar pada 15 kecamatan di Kota Makassar terdapat hanya 352 bank sampah yang aktif dan sekitar 662 bank sampah yang terpantau tidak aktif. Kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana pendukung seperti truk pengangkut sampah masih menjadi persoalan dimana jumlahnya yang belum begitu mampu meng-cover seluruh wilayah, ditambah dengan umur dari truk pengangkut sampah itu sendiri. Pemungutan retribusi yang masih menggunakan sistem konvensional dengan melakukan pemungutan door to door dan jumlah biaya yang dirasakan masih kurang menutupi biaya operasionalisasi penanganan kebersihan perlu dilakukan evaluasi. Kesadaran dari masyarakat yang masih kurang terkait membuang sampah pada tempatnya dan pemahaman terkait jadwal pengangkutan sampah serta masyarakat yang masih tidak tertib dalam pembayaran retribusi berdampak pada terhambatnya proses penanganan kebersihan yang dilaksanakan. Petugas kebersihan yang umurnya tidak lagi produktif dan jumlah yang kurang memadai memberi dampak langsung yaitu keterlambatan proses penanganan kebersihan. Kesenjangan yang terjadi lainnya yaitu TPA Antang yang masih menggunakan sistem *open dumping* yang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan seperti pencemaran air dan udara serta mengakibatkan gangguan kesehatan langsung bagi para petugas TPA dan warga sekitar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan referensi dan juga pembanding antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang relevan ataupun sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, sehingga dari perbandingan ini penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan tentunya memiliki acuan serta referensi yang berkesinambungan, serta penelitian terdahulu dapat menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti memilih 10 referensi antara lain; Penelitian Purnama Rizki DA HSB tahun 2020 yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah(Purnama,2020) menemukan bahwa DLHK3 kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi program 3R pada pengelolaan sampah namun masih terdapat kendala pada kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah , kurangnya armada pengangkutan sampah , dan belum terjalannya kerja sama DLHK3 dengan pihak TPA Blang Bintang dalam pembuangan sampah mengakibatkan masih terkenanya komisi sebesar 13 ribu per ton sampah.

Penelitian Yosep Raga tahun 2019 yang berjudul Analisis Penanganan Masalah Sampah Oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang(Yosep Raga,2019) menemukan bahwa Dinas Kebersihan Kota Kupang dalam pelaksanaan sosialisasi dan penegakan terhadap masyarakat terkait membuang sampah secara sembarangan belum dinilai berhasil karena pada kenyataannya masih ditemukan titik-titik sampah baru. Dalam hal pengumpulan sampah masih terkendala dalam penyediaan fasilitas seperti gerobak hingga kurangnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) kemudian dalam hal pembuangan sampah sudah cukup baik namun kembali fasilitas seperti armada pengangkut sampah masih menjadi hal yang perlu dibenahi dan juga tempat pembuangan akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem *open dumping* perlu diperhatikan kedepannya. Penelitian Sofyan tahun 2015 yang berjudul Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Takalar(Sofyan,2015) menemukan bahwa Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup telah mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat walau belum menyeluruh dalam pelayanan penjemputan dan pengangkutan sampah.Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan masih belum terealisasi secara maksimal. Upaya yang dilakukan oleh DKLH kedepan ialah penyediaan tempat penampungan sampah di tempat-tempat yang rawan akan sampah dan pensosialisasian lebih maksimal terhadap pengelolaan sampah.

Penelitian Rizki Wahyu dan Nurhayati tahun 2022 yang berjudul Analisis Penanganan Kebersihan Lingkungan kota oleh Pemerintah Kota Medan(Rizki&Nurhayati,2022) menemukan bahwa Dalam pengelolaan sampah, pihak Pemko Medan juga mengubah sistem pengelolaannya dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill. Open Dumping adalah solusi melakukan ini adalah administrasi yang sangat mendasar dengan membuang sampah di tempat atau mangkuk tanpa melibatkan tanah sebagai penutup sampah. Atau lagi-lagi kita bisa berasumsi bahwa sampah hanya ditempatkan di satu tempat tanpa tertangani. Teknik bagi pengurus ini pada dasarnya hanya berlaku selama 5 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2008 tentang pengelolaan sampah. Dampak yang akan ditimbulkan juga sangat besar, selain mencemari tanah dan air, juga mengundang serangga seperti tikus. Sanitary Landfill adalah pembuangan sampah para pelaksana dilakukan dengan memisahkan sampah yang akan ditampung berdasarkan jenis sampahnya. Dengan kerangka ini, perangkat seperti traktor dan track loader diharapkan dapat mengecilkan sampah dan kemudian menutupinya dengan tanah sebagai lapisan penutup.

Penelitian dari Iswanto dkk 2017 yang Berjudul Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda(Iswanto dkk,2017) menemukan bahwa Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan di Kota Samarinda kurang optimal. Terindikasi oleh parameter yang ditentukan, yaitu dari 6 parameter yang ditetapkan, diantaranya terdapat 3 parameter dinyatakan dapat aplikasikan dengan baik, yaitu aspek pengaturan kegiatan operasional, pengembangan sarana dan prasarana penunjang kebersihan, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, sedangkan perannya sebagai pembina petugas pelaksana, pengelola sampah, dan pengawasan terindikasi kurang efektif serta Faktor yang menghambat peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda dalam meningkatkan kebersihan lingkungan antara lain kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam membuang sampah Kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat atas Perda Nomor 02 tahun 2011, terbatasnya prasarana dan prasarana (kotak/bak sampah) untuk pembuangan sampah dan lemahnya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku serta lemahnya pengawasan.

Penelitian dari Aidil Aulya Fasdani 2018 yang berjudul Politik Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan(Aidil,2018) menemukan bahwa Strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan cenderung gagal dan lemah seperti swastanisasi pengangkutan sampah, program ini justru menjadi biang timbulnya timbunan sampah. Swastanisasi pengangkutan sampah juga semakin memperendah kesadaran instansi pemerintah khususnya Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Swastanisasi pengangkutan sampah juga membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah yang pada akhirnya masyarakat membuang sampah pada TPS-TPS di pinggiran jalan, trotoar maupun drainase dan sungai-sungai serta Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang penulis anggap paling dominan adalah minimnya sumber daya anggaran guna memodernisasi pola pengelolaan sampah khususnya dengan menghadirkan TPS3R pada pemukiman penduduk dan peningkatan kapasitas mesin pengelolaan sampah pada TPA Muara Fajar. Selain itu tidak dapat dielakkan bahwa faktor sumber daya manusia turut mempengaruhi pengelolaan sampah, hal ini paling tidak dapat dilihat dari kurangnya kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan sampah oleh leading sector instansi pengelola sampah (DKP).

Penelitian dari Maulidyka Agustyan dkk tahun 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Manado(Maulidyka dkk,2017) menemukan bahwa Yang menjadi sasaran atau tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan adalah

Mewujudkan Lingkungan Asri dan Lestari yang Menopang Keparawisataan. Ini telah dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dengan melibatkan Instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) dan mendisposisikan ke Kecamatan serta Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang penanganan kebersihan terkait dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, secara internal lingkup dinas tersebut berupaya melakukan komunikasi-komunikasi yang intens pada semua para bawahan yang terlibat dalam sukseksi sebuah program serta mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan.

Penelitian Eny Boedi Orbawati dan Retno Dewi Pramodia Ahsani 2020 yang berjudul Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Magelang(Eny&Retno,2020) menemukan bahwa Dalam mengatasi permasalahan persampahan, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup telah melibatkan seluruh stakeholders terkait, termasuk unsur masyarakat, Swasta dan pemerintah dalam penanganan masalah persampahan. Di samping itu, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki otoritas dan regulasi dalam menetapkan kebijakan persampahan sehingga telah responsif terhadap masalah pelayanan persampahan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah responsif dalam pelayanan persampahan sisi daya tanggap potensialnya dan daya tanggap actual. Penelitian Riau Sujarwani 2016 yang berjudul Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang(StudiPadaKegiatan Daur UlangSampah)(Riau Sujarwani,2016) menemukan bahwa Pelaksanaan Kebijakan dalam pengelolaan sampah oleh Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang (studipadake-giatan daur ulangsampah)berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran kebijakan yang cukup baik, yang merupakan penjabaran dari tujuan kebijakan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tertentudan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini pastinya berdampak positif untuk mengatasi permasalahsampah. Dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan ditepi-tepi jalan dan penumpukan ditempat-tempat sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadi sampah sebagai sumber daya.

Penelitian Farhans Azis Mubarakh dkk tahun 2021 yang berjudul Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang(Farhan dkk,2021) menemukan bahwa Sejauh ini pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan melalui beberapa program, diantaranya program bank sampah, TPS 3R, rumah kompos dan mesin karbon. Namun diantara beberapa program yang diterapkan oleh pemerintah bank sampah merupakan program unggulan yang menjadi priotas untuk menurunkan timbunan sampah di hulu agar timbunan sampah di hilir dapat berkurang. Ironisnya program bank sampah ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan di sisi lain pemerintah juga masih kurang dalam melakukan sosialiasi dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin membuat bank sampah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Analisis Kinerja Pemerintah Kota Dalam Penanganan Kebersihan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan melalui teori yang berbeda yakni teori Pengukuran Kinerja Birokrasi Publik (Agus Dwiyanto:2006), dengan melihat melalui dimensi Produktivitas, Responsivitas, dan Responsibilitas, tentunya dengan indikator yang berbeda pula serta lokasi penelitian yang berbeda. Dan juga dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Makassar dapat menyelenggarakan penanganan kebersihan secara optimal, faktor penghambat dari penanganan kebersihan, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengatasi faktor penghambat demi penciptaan kebersihan kota yang optimal di Kota Makassar.

II. METODE

Menurut (Sugiyono, 2013:1) bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada hal-hal alamiah (bukan eksperimen) dimana instrumen kunci penelitian ialah peneliti itu sendiri dengan proses pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (gabungan). Proses pengumpulan data yang dimaksud adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan teknik Purposive sampling dan Accidental Sampling. Dimana untuk Purposive Sampling peneliti memilih 8 orang yang telah memenuhi kriteria persyaratan peneliti yang sesuai dijadikan sebagai narasumber, 8 orang tersebut terdiri dari Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Koordinator Bagian Bidang PersampahanLimbah B3, Camat Manggala, Camat Panakukkang, Lurah Batua, Lurah Karampuang, Pengelola UPT TPA, Pengelola Bank Sampah, sedangkan untuk accidental sampling tertuju pada petugas kebersihan dan masyarakat yang ditemui saat pelaksanaan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni menggunakan teori Pengukuran Kinerja Birokrasi Publik (Agus Dwiyanto:2006) dapat dilihat dari dimensi Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis kinerja pemerintah kota dalam penanganan kebersihan di Kota Makassar menggunakan teori dari Agus Dwiyanto dengan melihat dimensi Produktivitas, Responsivitas, dan Responsibilitas.

3.1 Produktivitas

Pelaksanaan penanganan kebersihan oleh Pemerintah Kota Makassar tentu harus meninjau sejauh mana produktivitas tercapai yang berupa kemampuan pelaksanaan pekerjaan, pencapaian target yang harus terpenuhi, serta kelengkapan/penyediaan sarana dan prasarana yang tentunya akan sangat membantu para petugas ketika berada di lapangan. Penyediaan sarana dan prasarana yang tepat dan layak akan

mampu mempengaruhi durasi dan keberhasilan pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian, penyediaan sarana dan prasarana terus digemborkan oleh pemerintah Kota Makassar walaupun masih belum begitu maksimal dalam hal pemerataannya pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan sarana dan prasarana yang tepat juga mampu berdampak pada partisipasi masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang bersih. Peletakan dan pemenuhan jumlah tempat sampah pada titik-titik strategis seperti di tempat wisata, sekolah-sekolah, serta pasar-pasar telah terlaksana namun jumlahnya masih belum begitu banyak. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti dalam dimensi Produktivitas untuk penanganan kebersihan terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara maksimal. Dari kemampuan para petugas dalam bekerja sebenarnya sudah cukup namun dari pihak pemerintah Kota Makassar, Kecamatan dan Kelurahan dituntut untuk memberikan motivasi kerja yang lebih pada para petugas demi pencapaian target pada tiap pelaksanaan tugas. Untuk penyediaan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal oleh dinas lingkungan hidup, kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, perlu dilakukan inventarisasi yang baik oleh dinas lingkungan hidup, kecamatan dan kelurahan terkait ketersediaan sarana dan prasarana dan terus memantau kelayakannya secara teratur serta perlu dilakukan cara untuk menarik minat dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.

3.2 Responsivitas

Responsivitas seperti yang dimaksud adalah kemampuan pihak pemerintah kota dalam merespon keluhan dan aduan masyarakat serta keselarasan program dari pemerintah kepada masyarakat akan sangat berpengaruh dalam penciptaan penanganan kebersihan yang maksimal. Selanjutnya bahwa telah terdapat upaya dari pihak kelurahan dan kecamatan dalam merespon aduan dari masyarakat yang mana peneliti ikut terlibat langsung memantau proses aksi atau tindakan yang dilakukan di Jalan Batua, Kecamatan Manggala dan hal itu terus dilakukan upaya optimalisasi. Responsivitas, dalam pelaksanaan penanganan kebersihan pemerintah selalu mencoba membuka diri terhadap setiap keluhan/aduan dan sesegera mungkin menyelesaikannya. Setiap pihak seperti kecamatan dan kelurahan bahkan UPT TPA Antang mempunyai cara tersendiri dalam menjawab dan merespon aduan dari masyarakat seperti pemanfaatan pakandatto (Pasukan Anti Kotor) dan menggunakan no.hp untuk melaporkan aduan. Terlihat bahwa mekanisme pengaduan dan penyelesaian sedang diusahakan dalam bentuk yang optimal. Program gotong royong juga telah diupayakan sebagai bentuk kegiatan preventif masalah kebersihan. Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa telah ada usaha dan opsi tindakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, kecamatan, dan kelurahan untuk menampung segala aduan dan senantiasa ditanggapi secara positif dengan aksi

3.3 Responsibilitas

Responsibilitas menjadi prioritas oleh pemerintah Kota Makassar dalam bekerja dimana seluruh pelaksanaan tugas harus sesuai dan mengacu pada ketentuan dan aturan. Dalam penanganan kebersihan yang dilaksanakan pemerintah Kota Makassar khususnya dalam pengangkutan sampah bisnis/industri maupun sampah rumah tangga akan dikenakan biaya retribusi, untuk penetapan jumlah retribusi pemungutan sampah berpatok pada peraturan walikota yang dalam pemberian retribusi menggunakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) dengan kesepakatan bersama masyarakat yang sampahnya ingin diangkut petugas kebersihan. Biaya

retribusi yang dikenakan adalah Rp. 16.000/bulan yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan namun masalah timbul dimana jumlah retribusi tidak begitu mampu menutup biaya operasional ditambah dengan masyarakat yang masih ada tidak tertib dalam pembayaran retribusi. Selanjutnya Pemerintah Kota Makassar yang menanggungjawab langsung TPA Antang dimana sampah tertumpuk dengan sangat besarnya akan menimbulkan berbagai gangguan seperti kesehatan. berbanding terbalik dengan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 2011 pada pasal 4 pengelolaan sampah yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk segera mungkin memberikan solusi atau setidaknya mengusahakan adanya pemberian kompensasi kepada masyarakat sekitar TPA dari dampak negatif yang timbul. Observasi dan pengamatan dilakukan peneliti, peneliti melihat dampak yang ditimbulkan oleh keadaan TPA Antang saat ini benar adanya, peneliti merasakan bau yang sangat mengganggu saat mengunjungi lokasi TPA dan ditambah banyak lalat yang bisa saja membawa berbagai penyakit pada petugas dan warga sekitar. Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa dari dimensi Responsibilitas sudah cukup sesuai namun masih perlu dilakukan evaluasi yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan juga diperlukan penyesuaian peraturan daerah yang mengatur terkait penanganan kebersihan ini.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyelenggaraan penanganan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar tentu akan berdampak baik dan tidaknya pada terciptanya lingkungan kota yang baik. Namun dalam pelaksanaannya tidak selamanya berjalan sesuai rencana, sama halnya seperti hasil penelitian Farhans Azis Mubarak dkk tahun 2021 dimana kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal pengelolaan sampah khususnya penyediaan bank sampah yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga hal ini menjadi pekerjaan tambahan bagi pemerintah daerah (Farhan dkk, 2021). Dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa memang bank sampah yang tersedia di Kota Makassar tidak begitu aktif dalam kegiatannya mengelola sampah sebelum berakhir pada TPA dan tentunya ini perlu dilakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampahnya di bank sampah. Selanjutnya berbeda dengan Penelitian Rizki Wahyu dan Nurhayati tahun 2022 yang menemukan bahwa Dalam pengelolaan sampah, pihak Pemko Medan juga mengubah sistem pengelolaannya dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill (Rizki & Nurhayati, 2022) dimana pada pemerintah Kota Makassar masih menerapkan sistem Open Dumping yang masih menimbulkan berbagai permasalahan tambahan khususnya pada lingkungan seperti pencemaran air dan udara serta mengganggu kualitas kesehatan petugas dan warga sekitar TPA. Selanjutnya dalam penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa pemerintah Kota Makassar masih berfokus mengandalkan kekuatan internal melalui dinas lingkungan hidup, kecamatan dan kelurahan serta dengan dukungan dari tim pakandatto dan motivator-motivator dlh dalam penciptaan penanganan kebersihan yang mana perlu dilakukan usaha kerjasama dengan pihak ketiga seperti halnya pada penelitian Eny Boedi Orbawati dan Retno Dewi Pramodia Ahsani tahun 2020 dimana Pemerintah Daerah Magelang khususnya Dinas Lingkungan Hidup telah melibatkan seluruh stakeholders terkait, termasuk unsur masyarakat, Swasta dan pemerintah dalam penanganan masalah persampahan (Eny & Retno, 2020). Pengenaan biaya retribusi pada pengangkutan sampah dari masyarakat yang diatur dalam Peraturan

daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masih diterapkan hingga saat ini, namun hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terkait jumlah retribusi yang nyatanya belum begitu mampu menutupi biaya operasionalisasi penanganan kebersihan yang sama halnya pada penelitian Maulidyka Agustyan dkk tahun 2017 dimana pemerintah Kota Manado juga menerapkan pemungutan retribusi namun hasilnya dimanfaatkan lebih luas seperti pada bidang pariwisata(Maulidyka dkk,2017). Penyediaan sarana dan prasarana seperti armada dan pendukung lainnya harus terus diusahakan pemerintah Kota Makassar dimana peneliti menemukan bahwa hal tersebut masih menjadi hambatan dalam proses penanganan kebersihan yang sama halnya ditemukan pada penelitian Purnama Rizki DA HSB dimana penyediaan armada menjadi salah satu hambatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah(Purnama,2020). Selanjutnya, koordinasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Makassar telah terbilang baik dimana pihak kecamatan dan kelurahan selalu berkoordinasi terkait perkembangan, hambatan hingga inventarisasi sarana dan prasarana layaknya temuan dari penelitian Purnama Rizki DA HSB. Hal yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait membuang sampah yang masih kurang walau telah disediakan tempat sampah diberbagai tempat dan hal ini sejalan dengan hasil temuan Yosep Raga(Yosep Raga,2019). Selanjutnya dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar namun perlu dilakukan pengoptimalan serta perlu dilakukan usaha baru seperti penambahan jumlah anggaran dan sebagainya.

IV. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja penanganan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan hidup, Kecamatan, dan Kelurahan telah cukup baik yang disertai dengan berbagai hambatan yang perlu dilakukan penyelesaian seperti penyediaan sarana dan prasarana, Peningkatan kualitas TPA, sosialisasi yang perlu digemborkan serta penyesuaian segala bentuk regulasi dengan keadaan nyata di lapangan.

Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penentuan jadwal wawancara bersama narasumber yang telah ditentukan juga cukup menyulitkan ketika narasumber sedang tidak tersedia pada hari wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*), Peneliti sangat yakin dan berharap bahwa dari penelitian ini akan dilakukan penelitian-penelitian lanjutan terkait tata kelola penanganan kebersihan yang tidak hanya berlokasi di Kota Makassar namun bisa dilakukan pada daerah lain dan bila mana hasil penelitian yang disertai saran serta solusi terbaik peneliti berharap akan diterapkan pada seluruh wilayah Indonesia menyesuaikan dengan situasi yang ada pada tiap daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan pada Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, pihak kecamatan dan kelurahan, pihak Bank Sampah Pusat dan Unit, Pengelola TPA Antang, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, (2006), *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Armosudiro, P. (2006). *Konsep Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aidil Aulya Fasdani, (2018). "Politik Lingkungan: Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan"
- Eny Boedi Orbawati, Retno Dewi Pramodia Ahsani, (2020). "*Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelayanan Persampahan Di Kota Magelang*"
- Farhans Azis Mubarakh dkk. (2021). "*Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang*"
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HSB, Purnama Rizki DA. (2020). "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Sampah*"
- Iswanto dkk, (2017). "*Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Di Kota Samarinda*"
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moehariono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi : Competency based human resource management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulidyka Agustyan dkk, (2017). "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Manado*"
- Raga, Yosep. (2019). "*Analisis Penanganan Masalah Sampah Oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang*"
- Rizki Wahyu, Nurhayati (2022). "*Analisis Penanganan Kebersihan Lingkungan kota oleh Pemerintah Kota Medan*"
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, I. K. (2003). *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Subrata, I. (2013). *Perilaku Negatif Merusak Lingkungan Hidup*. Bandung: CV Niaga Buku Pendidikan.
- Suwarjani, Riau (2016). "*Pelaksanaan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang(StudiPadaKegiatan Daur UlangSampah)*"
- Sofyan. (2015). "*Peran Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Takalar*"

Torang, S. (2015). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Edisi 5. Surabaya: Rajawali Pers.

